



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULYADI Z.
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 6339

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 591.720.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 213 m2/96 m2 di KOTA PADANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 215 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.
28.000.000
3. Tanah Seluas 363 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/160 m2 di TANGERANG,
HASIL SENDIRI Rp. 178.000.000
5. Tanah Seluas 457 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
6. Tanah Seluas 390 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.
11.000.000
7. Tanah Seluas 6 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 159.720.000
8. Tanah Seluas 311 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 300.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 24.275.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	132.740.248
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.048.735.248
III. HUTANG	Rp.	225.300.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	823.435.248

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.